

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Rasyid, M. R. (2021). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2022). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual Dan Praktik*.
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suradinata, E. (2022). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2021). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

2. Skripsi/Tesis

- Meutia, Esa. (2015). *Akuntabilitas pemerintah daerah Kota Padang Panjang*. Publika, 3(3), 1–15. Universitas Negeri Surabaya.
- Elvandraich. (2022). *Peran Tuha Peut Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Gampong*.
- Iqbal, M. (2022). *Peran Tuha Peut Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Gampong Blang Bladeh, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan*.
- Kasnidar. (2018). *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Konflik Di Dalam Masyarakat*.
- Mustafa, A. (2023). *Efektivitas Tuha Peut Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Menurut Qanun Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Gampong Ditinjau Menurut Fiqh Siyasah (Studi Penelitian Di Gampong Luar Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*.
- Nurlia, C. (2023). *Peran Tuha Peut Dalam Menyelesaikan Kasus Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar)*.
- Parda, A. F. (2023). *Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan*.

Sugiarti, L. (2020). Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E) Fakultas Syariah Dan Hukum.

Zulfan Saputra. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Lieue Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3. Jurnal

Agustin, M. W., & Mustoffa, A. F. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar. *Owner*, 7(3), 1919–1929.

Arif, A., Basri, M., & Mustafa, L. O. (2022). Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Kecamatan Wolo. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 13(2), 2502–5589.

Bakri La Suhu, Abdul Halil Hi. Ibrahim, Abdullah Kaunar, B. U. (2022). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tahun 2019 Di Desa Dama Kecamatan Loloda Kepulauan. *Jurnal Government Of Archipelago JGOA*, III No. 2(C), 18–23.

Falah, S., Waromi, J., & Sulistiawan, S. (2024). Kelola: Kajian Terhadap Pemerintah Kampung Perbatasan. 10(4), 220–231.

Gafar, T. F., Octavia, S., Zamhasari, Suryningsih, & Wijaya, M. (2022). Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUD) Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(3), 539–552.

Hendra, A., Mayulnita, & Nasrizal. (2021). Peranan Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Aia Amo Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Administrasi Publik, Bisnis Dan Perencanaan Pembangunan Pedesaan*, 3(1), 1–8.

Hendrawati. (2017). Akuntabilitas Kepala Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Akuntansi*, 11.

Imran D, S.Hi, M. H. (2019). Peran Tuha Puet *Gampong* Dalam Mengawasi Pembangunan *Gampong*. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Mualif, A. (2022). Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah. 1–22. <https://osf.io/preprints/ysqv5/>

- Munthe, B. R. (2022). Campuran Akibat Perceraian Menurut Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M / 1443 H (Vol. 2019, Issue 16).
- Nahwa, F., & Batara, G. (2023). Apakah Moralitas Individu Memoderasi Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa? Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 8(3), 394–405.
- Rahmat, B. (2022). Pengawasan BPR Artha Galunggung: Strategi Dalam Good Corporate Governance. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 3(2), 8–17.
- Ridha, A., & Dewi, N. S. (2022). Efektivitas Fungsi *Tuha Peut Gampong* Dalam Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja *Gampong* (APBG). Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah, 1(2), 140–160.
- Rika Widianita, D. (2023). Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah *Gampong* Oleh *Tuha Peut* Menurut Qanun Aceh No 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam, VIII(1), 1–19.
- Septian, R. (2022). Manajemen Membangun Brand Image (Citra Sekolah) Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Media Manajemen Pendidikan, 4(3), 496–507.
- Sinaga, I. A. (2023). Sistem Informasi Fak. Sains & Teknologi UIN Sumatera Utara Medan.
- Siti Humaeroh, Ipah Ema Jumiati, & Delly Maulana. (2022). Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 79–91.
- Susanti, M., Ikhyannuddin, I., Yunita, N. A., & Firdaus, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 2(1), 120.
- Ummah, M. S. (2019). Pengaruh Kemampuan Internal Petani Terhadap Partisipasi Petani Dalam Kelompok Tani Di Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun. Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14.

4. Media Massa/Internet

- Hendra, A., Mayulnita, & Nasrizal. (2021). Peranan Lembaga Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Aia Amo Kabupaten Sijunjung. Diakses dari <http://ejournal.stia-lppn.ac.id/index.php/index/index>

Parda, A. F. (2023). Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan. Diakses dari <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25889/>

5. Peraturan Perundang-undangan

Aceh, G. (2008). Qanun Aceh No.10 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

UUD 1945. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.